

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TW I DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA 2018**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- f. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/323/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang pedoman untuk membangun Zona Integritas di Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro;
- g. Hasil monev kebijakan keterbukaan informasi publik TW I Dittipidkor Bareskrim Polri TA 2018.

2. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik antara lain:

- a. Laporan secara berjenjang kepada pimpinan hasil evaluasi dari pelaksanaan pelayanan publik melalui website/online yang diberikan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- b. Untuk internal Dittipidkor sendiri perlu dibentuk tim Pokja untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dithumas Polri dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri, agar dapat diterima oleh masyarakat luas.

- c. Mengajukan ketambahan personel kepada Bagsumda Rorenmin Bareskrim Polri dan atau mengusulkan personel wilayah agar dapat melaksanakan mentoring menimba ilmu dan pengalaman/BKO pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

3. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini masih harus terus dilakukan pembenahan dan evaluasi guna terciptanya pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 13 April 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI